

Peran Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting

¹ Nurhadi ² Syamsudin ³ Febriyanti Angelia Ginting
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia
nurhadi@up45.ac.id

Abstrak

Angka prevalensi stunting di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal angka stunting yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Untuk itu, perlu percepatan penurunan angka stunting. Strategi nasional percepatan penurunan Stunting melalui peran pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait penanganan Stunting perlu dikaji agar efektif dan berdampak pada penurunan Stunting secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dan faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan Stunting di tingkat desa agar dapat untuk meningkatkan kinerja kebijakan dan program. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 8 informan. Adapun informan telah ditentukan sebelum penelitian dilakukan sehingga pada penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten telah menjalankan peran dalam penanganan Stunting sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 yaitu menyangkut aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan/penggerakan. Selain itu, Pemerintah Desa Sengon juga menjalankan monitoring dan evaluasi untuk mengefektifkan implementasi kebijakan. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar program semakin optimal yaitu mengatasi masalah ketersediaan sumber daya khususnya menyangkut aspek keterbatasan dana dan aspek disposisi khususnya daya dukung pihak terkait seperti media, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan swasta serta masyarakat.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Implementasi, Penanganan, Stunting

Abstract

The prevalence rate of stunting in Indonesia is still higher than the maximum tolerance for stunting rates set by the World Health Organization (WHO). For this reason, it is necessary to accelerate the reduction in stunting rates. The national strategy to accelerate the reduction of stunting through village/district governments in implementing government policies related to handling stunting needs to be studied so that it is effective and has an impact on reducing stunting significantly. This research aims to determine the role of the village government and the factors that influence the implementation of policies for handling stunting at the village level in order to improve the performance of policies and programs. This research is qualitative research with descriptive methods. Data collection was carried out to obtain main and secondary data. Data collecting approaches were carried out through observation, documentation, and interviews with eight informants.. The informants were determined before the research was carried out so that this research used a purposive technique. The data analysis technique uses descriptive. The findings of this study indicate that the Sengon Village Government, Gantiwarno District, Klaten Regency has played a role in handling Stunting as mandated in Klaten Regency Regional Regulation Number 6 of 2020, namely covering aspects of planning, budgeting and implementation/mobilization. Apart from that, the Sengon Village Government also carries out monitoring and evaluation to make policy implementation more effective. Factors that influence policy implementation so that programs are more optimal are overcoming the problem of resource availability, especially including aspects of limited funds and disposition aspects, especially the support capacity of related parties such as the media, universities, non-governmental organizations and the private sector as well.

Keywords : Village Government, Implementation, Handling, Stunting

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan dilakukan untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Oleh karena, potensi bonus demografi yang dimiliki maka Pemerintah Indonesia menggalakan program kesehatan reproduksi untuk memastikan bahwa generasi masa depan Indonesia bebas dari *stunting* (Efendi,2022).

Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan. Penurunan ini didapat dari 27.7 persen (2019) menjadi 24,4 persen pada 2021 (Kompas.com,2022). Seiring hal tersebut, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Angka pravalensi *stunting* ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal angka *stunting* yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu kurang dari 20% (Sehat Negeriku, 2023). Untuk mencegah dan mengendalikan *stunting*, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional, studi tentang penanganan *stunting* di tingkat desa harus dilakukan.

Hal tersebut menurut Tampubolon (2020) didasarkan pada upaya pemerintah telah secara terstruktur melakukan intervensi terhadap masalah *Stunting* namun Pemerintah Daerah belum memasukkan *stunting* sebagai indikator capaian kinerja kesehatan. Selain itu, indikator keberhasilan penanganan secara terintegrasi di daerah juga belum menunjukkan ketercapaian hasil yang memadai baik aspek sumber daya,

organisasi dan komunikasi serta kondisi lingkungan sosial (Shauma dan Purbaningrum,2022). Adapun Herlina dan Astuti (2023) menyatakan bahwa pelaksanaan penanganan *Stunting* ditingkat desa masih dijumpai kendala sosialisasi program yang belum efektif dilihat dari beberapa kegiatan sosialisasi belum berjalan maksimal. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Astuti dan Ningrum (2023) bahwa pentingnya penanggulangan *Stunting* yang didasarkan pada hasil pemetaan *seperti halnya* di Kabupaten Klaten masih terdapat 4 Kecamatan dalam kategori tinggi.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten mengulirkan Program “*Gotong Royong Cegah Stunting*” atau “*Gong Ceting*” (Media Indonesia, 2022). Namun, Saat ini program tersebut kurang berjalan efektif. Hal tersebut didasarkan bahwa 6 dari 52 program pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 belum dilaksanakan. Dinas Kesehatan tidak dapat melakukannya sendirian, tetapi diperlukan kerja sama dengan pihak terkait dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dan komunikasi yang buruk antara Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lain, serta tidak adanya partisipasi masyarakat yang aktif, menjadi kendala dalam penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten.(Merliana, Karjoko dan Nugroho, 2023). Hal ini membutuhkan solusi agar Dinas Kesehatan dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mendorong masyarakat dan pihak terkait khususnya pemerintah desa untuk lebih waspada terhadap *stunting*.

Peran strategis dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan *stunting* berbasis desa belum banyak yang melakukan penelitian khususnya perspektif

mengembangkan desa sebagai pusat penanggulangan bencana (*disaster management*). Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah desa dan faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan *Stunting* di tingkat desa.

Studi tersebut diharapkan untuk dapat dijadikan referensi bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan dan program. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan ingin diungkap dalam penelitian ini adalah gambaran peran Pemerintah Desa Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam implementasi kebijakan penanganan *Stunting* dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Pemerintah Desa Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam implementasi kebijakan penanganan *Stunting* dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Manfaat penelitian yaitu manfaat praktis dan teoritis.

Manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengelola program penanganan bencana khususnya penanganan *Stunting* bagi pelaksana program dan pihak terkait. Adapun manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu manajemen kebijakan dan program penanganan bencana (*disaster management*) khususnya penanggulangan *Stunting*.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan keabsahan data atas dasar kredibilitas, kebergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena dalam studi kasus yang nyata

terjadi tanpa manipulasi (Moleong,2000). Penelitian ini dilakukan di Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Adapun obyek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

Pengumpulan data dilihat dari sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono,2016). Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dari informan yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini adalah data kegiatan penanganan *stunting* di Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, peraturan-peraturan terkait intervensi *stunting*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun informan telah ditentukan sebelum penelitian dilakukan sehingga pada penelitian ini menggunakan teknik purposive. Informan penelitian ini antara lain Kepala Desa Sengon, Kepala Urusan Kesejahteraan Pemerintah Desa Sengon, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sengon, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Bidan Desa Sengon Kecamatan Prambanan, Kader Posyandu dan masyarakat umum. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

Pembahasan

A. Peran Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam Penanganan *Stunting*

1. Merencanakan Program untuk Membantu Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam aspek perencanaan bahwa Pemerintah Desa telah merencanakan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*. Kegiatan perencanaan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di Desa Sengon menyangkut aspek tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program. Aspek tujuan yaitu menurunkan angka *pravalensi stunting* yang saat ini mencapai 30 anak. Selain itu juga program pencegahan *Stunting* dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku mereka untuk mencegah *stunting*

Adapun upaya pencegahan dan penanganan *stunting* dilakukan melalui sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah usia enam bulan, ibu menyusui dan anak usia enam sampai 23 bulan, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, calon pengantin, dan wanita usia subur, khususnya keluarga. Adapun aspek perencanaan penanganan *stunting* oleh Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Aspek Perencanaan

No	Peran	Tujuan	Sasaran	Prioritas	Strategi	Program	Keterangan
1	Merencanakan	1. Menurunkan angka <i>pravalensi stunting</i> yang saat ini mencapai 30 anak. 2. Meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat	Ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, calon pengantin serta wanita usia subur dan sasaran masyarakat umum, khususnya keluarga	Prioritas sasaran yaitu calon penganti, ibu hamil dan menyusui serta balita juga anak pra sekolah	Strategi program dilakukan secara terpadu melalui Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) yaitu melibatkan pihak terkait baik jajaran TP PKK Desa dan Puskesmas Prambanan melalui tenaga medis Desa Sengon. Jajaran sekolah baik TK/SD dengan menyasar beragam kelompok sasaran	Aspek edukasi, promotif, preventif dan penanganan	

Sumber : Penelitian, 2024

Dari penyajian diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten setelah melaksanakan aspek perencanaan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pecegahan dan Penanggulangan *Stunting*. Adapun prioritas sasaran yaitu calon pengantin, ibu hamil dan menyusui serta balita juga anak pra sekolah. Adapun program yang dilakukan menyangkut aspek edukasi, promotif, preventif dan penanganan.

2. Mengalokasikan Anggaran untuk Membantu Mencegah dan Menangani *Stunting*

Hasil penelitian terkait peran Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam aspek penganggaran untuk penanganan *stunting* bahwa Pemerintah Desa Sengon telah memberikan anggaran untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Hal tersebut telah teralokasikan dalam anggaran untuk pencegahan dan penanganan *Stunting* melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2023 dan tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2023 melalui Sumber Dana Desa (DD) sebesar Rp 138.131.000. Adapun aspek penganggaran dalam penanganan *stunting* oleh Pemerintah Desa Sengon

Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Aspek Penganggaran Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Desa Sengon

No.	Peran	Alokasi	Tahun	Sumber	Jumlah
2	Menganggarkan	APBDes	2023	Dana Desa	138.131.000

Sumber : Penelitian,2024

Berdasarkan sajian tersebut Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten telah menganggarkan dana untuk beragam alokasi kebutuhan dalam menangani *stunting*. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa sebagaimana tertuang dalam tata aturan yang telah ditetapkan baik Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 maupun Pedoman Mekanisme Operasional Penggerakan Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Lini Lapangan.

3. Menggerakkan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

Hasil penelitian terkait peran Pemerintah Desa Sengon dalam aspek

Tabel 3. Aspek Penggerakan dalam Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Desa Sengon

Peran	Sasaran	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
3. Menggerakkan	Ibu Hamil	Pemberian konseling kesehatan dan kehamilan, pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia, pemberian zat besi dan asam folat, pelayanan pemeriksaan kehamilan (<i>Antenatal Care</i>) terpadu, pencegahan Pertolongan Persalinan dengan Komplikasi, Penanggulangan kekurangan yodium, penanggulangan kecacingan, perlindungan dari malaria dan penyakit menular lainnya dan pendampingan semua ibu hamil	TPPS/ TP PKK	
	Ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 bulan	Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Pemberian ASI Eksklusif, Pemberian konseling gizi dan kesehatan dan Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu	TPPS/ TP PKK	
	Ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan	Pemberian ASI hingga usia 23 bulan atau lebih didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), Penyediaan vitamin A dan obat cacing, Penyediaan suplementasi zink, fortifikasi zat besi ke dalam makanan, Pemberian perlindungan terhadap malaria, Pemberian imunisasi dasar lengkap, pencegahan dan pengobatan diare dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu	TPPS/ TP PKK	
	Balita	Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Asi eksklusif bagi bayi 0-6 bulan, Konseling menyusui bagi keluarga atau pengasuh, Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi keluarga atau pengasuh, Imunisasi, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, Pemberian makanan tambahan (PMT), Pemberian suplemen vitamin A, ikronutrien, zinc dan obat cacing, tatalaksana gizi buruk, Manajemen terpadu balita sakit, Pemantauan garam beryodium. Rujukan balita kurang gizi; dan Kelas ibu balita	TPPS/ TP PKK	
	Anak pra sekolah	Konseling Pemberian gizi seimbang bagi keluarga atau pengasuh; Pemberian obat cacing, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, Edukasi Sarapan dan jajanan sehat dan Pemberian makanan tambahan (PMT)	TPPS/ TP PKK	
	Anak usia sekolah	Pemberian obat cacing, Penjangkangan kesehatan, Upaya kesehatan sekolah; dan edukasi gizi seimbang, sarapan dan jajanan sehat	TPPS/ TP PKK	
Remaja	Posyandu/posbindu remaja, edukasi sarapan dan jajanan sehat pemberian suplemen tablet tambah darah; penyuluhan kesehatan reproduksi remaja; pembentukan	TPPS/ TP PKK		

menggerakkan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten telah menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*. Hal tersebut didasarkan pada berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di Desa Sengon dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan Tim Pelaksana PKK Desa Sengon sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Adapun sasaran kegiatan terdiri dari sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, calon pengantin serta wanita usia subur dan dengan sasaran masyarakat umum, khususnya keluarga. Adapun beragam kegiatan dengan target sasaran telah dilakukan melalui pemberdayaan TP PKK khususnya dalam Kelompok Kerja 4 yang mengkoordinasikan dan menggerakkan 4 Posyandu di Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Adapun aspek penggerakkan penanganan *stunting* oleh Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut :

		konselor sebaya; dan promosi gizi seimbang dan aksi bergizi remaja	
	Calon pengantin	Skринing kesehatan; promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif; dan Imunisasi	TPPS/ TP PKK
	Wanita usia subur	Suplementasi tablet tambah darah, penanggulangan Kekurangan energi kronis dan Keluarga Berencana	TPPS/ TP PKK
	Masyarakat umum (keluarga)	Gerakan masyarakat hidup sehat; memastikan dukungan kebijakan dan pendanaan oleh pemerintah desa; meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Rakyat bagi yang tidak mampu; menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui Bina Keluarga Balita, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua; memberikan pendidikan anak usia dini universal; memberikan pendidikan gizi masyarakat; menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana; memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja; bimbingan remaja dan pranikah; menyediakan dan memastikan akses sanitasi total berbasis masyarakat; pencegahan infeksi berulang; melakukan fortifikasi bahan pangan; dan melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan	TPPS/ TP PKK

Sumber : Penelitian,2024

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain menyangkut sasaran untuk ibu hamil meliputi Konseling kesehatan dan kehamilan, pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi anemia dan kekurangan energi kronis, pemberian zat besi dan asam folat pada ibu hamil, pencegahan pertolongan persalinan dengan komplikasi, penanggulangan kekurangan yodium, penanggulangan kecacingan, perlindungan dari malaria dan penyakit menular lainnya, dan pendampingan kepada semua ibu hamil. Selain itu, program yang ditujukan untuk ibu menyusui dan bayi di bawah usia enam bulan termasuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI Eksklusif, konsultasi gizi dan kesehatan, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu.

Kegiatan yang dimaksudkan untuk ibu menyusui dan anak usia 6 sampai 23 bulan termasuk pemberian ASI hingga usia 23 bulan atau lebih, didampingi dengan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), pemberian vitamin A dan obat cacing, penguatan zat besi, perlindungan terhadap malaria, imunisasi dasar lengkap, pencegahan dan pengobatan diare, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu. Aktivitas yang ditujukan untuk balita termasuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, dan konselor menyusui bagi keluarga atau pengasuh.

Konsultasi tentang pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) bagi

keluarga atau pengasuh, imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian makanan tambahan (PMT), suplemen vitamin A, ikronutrien, zinc, dan obat cacing, tata laksana gizi buruk, manajemen terpadu balita yang sakit, dan pemantauan garam beryodium. Rujukan untuk balita yang kekurangan nutrisi; dan tingkat pendidikan ibu balita.

Untuk anak prasekolah, kegiatan sasaran termasuk konseling, pemberian gizi seimbang bagi keluarga atau pengasuh, pemberian obat cacing, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, edukasi tentang sarapan dan jajanan sehat, dan pemberian makanan tambahan (PMT). Untuk anak usia sekolah, kegiatan sasaran termasuk pemberian obat cacing, jaringan kesehatan, upaya kesehatan sekolah, dan edukasi tentang gizi seimbang, sarapan dan jajanan sehat.

Sasaran untuk calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan, mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, dan melakukan imunisasi. Untuk wanita usia subur, program keluarga berencana, suplementasi tablet darah, dan pencegahan kekurangan energi kronis adalah contohnya. Sasaran masyarakat umum termasuk gerakan masyarakat hidup sehat, dukungan kebijakan dan dana pemerintah desa, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, Jaminan Kesehatan Rakyat dan Jaminan Kesehatan Nasional untuk orang yang tidak mampu, bantuan dan jaminan

sosial untuk keluarga miskin, Bina Keluarga Balita dan pendidikan pengasuhan orang tua, akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana, dan pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. sanitasi total berbasis masyarakat; pencegahan infeksi berulang; melakukan fortifikasi bahan pangan; dan melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dilapangan juga didapatkan bahwa Pemerintah Desa juga mendorong pendekatan program dengan *Collaborative Governance* namun masih terbatas melibatkan multipihak dilingkup infra desa. Strategi program yang terpadu dapat diamati dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti TP PKK Desa dan Puskesmas Kecamatan Prambanan melalui tenaga medis Desa Sengon, dan jajaran sekolah TK/SD. Strategi ini menyasar berbagai kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 bulan,

ibu menyusui dan anak usia 6 sampai 23 bulan, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, calon pengantin, dan wanita usia reproduktif. Untuk itu, percepatan penurunan stunting memerlukan partisipasi dari berbagai sektor dan pihak, seperti media, perguruan tinggi, swasta, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (LSM atau yayasan), dan sebagainya.

4. Monitoring dan Evaluasi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sengon juga melaksanakan aspek monitoring dan evaluasi program dalam penanganan stunting. Adapun aspek penanganan *stunting* oleh Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Aspek Monitoring dan Evaluasi dalam Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Desa Sengon

No	Peran	Bentuk Kegiatan	Waktu	Peserta	Materi	Output
4.	Monitoring dan Evaluasi	Rapat Koordinasi Desa	1 X sebulan (minimum)	<ul style="list-style-type: none"> ✓TPPS ✓Tim Pendamping Keluarga ✓Pengelola data 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penggerakan dan Pendampingan Keluarga beresiko stunting. ✓Kemitraan dalam Percepatan Penurunan Stunting, ✓Paket layanan dasar di desa, Penyediaan Data Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> ✓Laporan pelaksanaan kegiatan Stunting di tingkat dusun/RW dan RT, ✓Rencana teknis pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting antara para pemangku kepentingan dan mitra strategis di tingkat desa/kelurahan, ✓Meningkatnya pemahaman pelaksana teknis kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;

Berdasarkan penyajian diatas dapat ditunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sengon melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan minimal dilakukan 1

bulan sekali dalam bentuk rapat kooordinasi dengan melibatkan TPPS dan Tim Pendamping Keluarga serta Tim Pengelola Data. Salah satu informasi disampaikan dalam kegiatan tersebut yaitu laporan pelaksanaan kegiatan Stunting di

tingkat Dusun/RW dan RT. Informasi laporan tersebut didapatkan dari hasil penggerakan dan pendampingan keluarga beresiko stunting dan kemitraan dalam percepatan Penurunan Stunting serta paket layanan dasar di desa dan penyediaan data stunting. Monitoring dan evaluasi ini sangatlah penting sehingga perlu dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Desa Sengon melalui TPPS Desa Sengon. Hal tersebut didasarkan pada pencermatan dilapangan aspek monitoring dan evaluasi ini belum dilakukan secara efektif. Kegiatan monitoring dan evaluasi terkadang sering terjadi secara informal dan belum terkelola secara baik.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten

Keberhasilan Implementasi kebijakan penanganan Stunting di Desa Sengon dalam kerangka percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimandatkan oleh kebijakan yang berlaku dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang melingkupi kebijakan dalam penanganan Stunting. Berikut rekapitulasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Sengon berdasar hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Oleh Pemerintah Desa

Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten

Implementasi	Aspek	Kegiatan	Keterangan
B. Faktor	Komunikasi	Proses komunikasi telah dilakukan secara baik antara pelaksana program dengan kelompok sasaran melalui saluran komunikasi secara langsung seperti pertemuan, pelatihan, konseling dan komunikasi secara tidak langsung melalui sarana telekomikasi (smartphone) dengan dibentuk WhatsApp Group. Proses komunikasi dilakukan sering dalam kegiatan penyuluhan dengan dipadukan dengan pemberian proses Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE).	Tidak terkendala
	Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana prasarana sudah memadai menyangkut kualitas dan kuantitas yang ada.	Sumber Dana masih perlu daya dukung
	Disposisi	Komitmen dan daya dukung pelaksana program (TPPS) terhadap kegiatan penanganan stunting sudah baik (mengalokasikan dana desa untuk program Stunting dan kinerja yang tinggi dalam tim)	Namun komitmen keluarga dan multi pihak terkait perlu ditumbuhkan untuk penurunan stunting
	Struktur Birokrasi	Program telah dijalankan dengan baik melalui Standar Operasionar Prosedur yang memadai oleh perangkat tim pelaksana (TPPS) yang memadai dan jelas tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam struktur birokrasi	Tidak terkendala

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil sajian penelitian diatas dapat diketahui bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan stunting terjadi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran dan antar tim pelaksana program. Adapun komunikasi dilakukan melalui saluran komunikasi secara langsung seperti pertemuan, pelatihan, konseling dan komunikasi secara tidak langsung melalui sarana telekomikasi (*smartphone*) dengan dibentuk *WhatsApp Group*. Adapun kegiatan penyuluhan merupakan bentuk komunikasi yang sering dilakukan dan dipadukan dengan aspek informasi dan edukasi (KIE) oleh pelaksana program kepada kelompok sasaran. Adapun materi penyuluhan/KIE adalah materi pokok yaitu materi pencegahan Stunting serta materi kesehatan lainnya dan materi pendampingan keluarga berisiko Stunting dalam upaya pencegahan kasus Stunting dengan fokus sasaran: calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pasca salin (masa interval) serta pengasuhan baduta dan balita.

Pemerintah Desa Sengon melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melakukan kegiatan KIE / penyuluhan minimal sebulan sekali. Adapun kegiatan

KIE dilaksanakan baik di tingkat desa, RW dan/atau RT, baik secara perorangan maupun kelompok dengan memanfaatkan momentum dan forum di tingkat desa/kelurahan atau forum tingkat RW/RT yang sesuai dengan peraturan atau kebiasaan setempat. Adapun pelaksana KIE/penyuluhan antara lain Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh KB/PLKB, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh Agama, Penyuluh Sosial, Penyuluh Pertanian, TP. PKK, PAUD, Kader Pembangunan Manusia, Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Kader Posyandu, Kader Dasawisma, Kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat (Karang Taruna, BKB, BKR, BKL, UPPKA, kelompok perempuan dst.), dan Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.

Berdasarkan paparan informasi diatas bahwa Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan kabupaten Klaten telah melaksanakan proses komunikasi kepada kelompok masyarakat sasaran melalui kegiatan penyuluhan sebagai bentuk kegiatan terpadu menyangkut Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Namun, kegiatan KIE berupa penyuluhan kepada sasaran kelompok masyarakat belum semua diinisiasi dan dilakukan oleh tim seperti penyuluhan pertanian. Hal tersebut karena adanya keterbatasan anggaran. Selain itu, KIE terhadap kelompok remaja terkait penyuluhan kesehatan kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan motivasi kelompok remaja sebagai kelompok sasaran masih rendah. Kegiatan KIE tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perubahan perilaku keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan kasus Stunting dan kasus kesehatan lainnya.

2. Sikap dan Komitmen

Sikap dari lembaga-lembaga pengelola yang dimaksud di sini adalah sikap atau dukungan dari pihak-pihak terkait (*stakeholder*) khususnya Tim Percepatan

Penurunan Stunting (TPPS) Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam kegiatan penanganan Stunting. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dapat diketahui bahwa sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan (TPPS) terhadap penanganan Stunting sudah baik. Hal tersebut tercermin dengan telah terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Desa Sengon dan telah bekerja secara optimal. Selain itu, kesediaan Pemerintah Desa Sengon untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan stunting, Hal tersebut sebagai wujud bahwa Pemerintah Desa Sengon telah berperan dalam penanganan Stunting melalui penganggaran dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2020.

Adapun keterlibatan *stakeholder* lain sebagai bentuk partisipasi pendekatan multi sektor sebagaimana diatur dalam kebijakan penanganan stunting belumlah optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat sipil seperti Organisasi Non Pemerintah/LSM belum berperan serta dalam percepatan penurunan Stunting di Desa Sengon. Padahal, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting memerlukan koordinasi dan kolaborasi multisektor dan multipihak mulai dari fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko Stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar terjadi sinergitas program dan kegiatan lintas sektor dan lintas pihak. Selain itu, pendekatan keluarga berisiko stunting juga perlu perhatian. Dari hasil wawancara dilapangan bahwa dukungan dan komitmen dari orang tua khususnya yang anaknya terindikasi Stunting masih dijumpai kurang responsif. Hal tersebut menurut hasil wawancara disebabkan orang tua terkadang resisten jika anaknya diindikasikan gejala stunting. Selain itu, faktor kesibukan orang tua khususnya bekerja sehingga penanganan

stunting melalui pola asuh keluarga kepada anak kurang memadai.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana program khususnya TPPS dan stakeholder lainnya secara kuantitas dan kualitas telah memadai. TPPS Desa Sengon dalam melaksanakan tugas kiranya cukup handal dengan di dukung Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh KB/PLKB, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh Agama, Penyuluh Sosial, Penyuluh Pertanian, TP. PKK, PAUD, Kader Pembangunan Manusia, Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Kader Posyandu, Kader Dasawisma, Kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat (Karang Taruna, BKB, BKR, BKL, UPPKA, kelompok perempuan dst.), dan Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.

Adapun ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana pendukung secara kuantitas dan kualitas telah memadai. Berdasarkan pengamatan dilapangan fasilitas tersedia dalam kondisi baik.. Sedangkan ketersediaan sumber dana bagi percepatan penurunan stunting masih bersumber dari dana desa yang tertuang dalam APBDesa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Kebutuhan ideal anggaran masih belum tercukupi karena sumber anggaran masih terbatas dari Pemerintah Desa Sengon. Sedangkan dukungan dana dari pihak lain belum ada.

4. Struktur birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor kebijakan penanganan stunting di Desa Sengon telah dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Sengon dengan melibatkan berbagai unsur multi pihak di luar jajaran Pemerintah Desa Sengon. Implementor juga di dukung antara lain Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh KB/PLKB, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh Agama, Penyuluh Sosial, Penyuluh Pertanian, TP. PKK, PAUD, Kader Pembangunan Manusia, Kader IMP (PPKBD dan Sub

PPKBD), Kader Posyandu, Kader Dasa wisma. Struktur organisasi dan deskripsi tugas telah disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Namun, keterlibatan *stakeholder* lain sebagai bentuk partisipasi pendekatan multi sektor sebagaimana diatur dalam kebijakan penanganan stunting belumlah optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat sipil seperti Organisasi Non Pemerintah/LSM belum berperan serta dalam percepatan penurunan Stunting di Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

Kesimpulan

Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten tidak saja menjalankan perannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pecegahan dan Penanggulangan Stunting dengan menjalankan peran pemerintah desa dalam aspek perencanaan, penganggaran dan penggerakan saja. Namun Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten juga menjalankan aspek monitoring dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan peran tersebut cukup mampu menurunkan angka indikasi *stunting* di Desa Sengon Kecamatan Prambanan kabupaten Klaten.

Keberhasilan penanganan stunting di Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten oleh Pemerintah Desa Sengon perlu ditingkatkan lagi dengan mengatasi faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut antara lain masalah ketersediaan sumber daya khususnya menyangkut aspek keterbatasan dana dan aspek disposisi khususnya daya dukung pihak terkait seperti media, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan swasta serta masyarakat. Komitment orang tua terkadang kurang memperhatikan arahan tim pelaksana dalam pencegahan dan penanganan *stunting*

Daftar Pustaka

- Armelia.S dan Nurhadi. (2023). Implementasi Kebijakan Perijinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Enersia Publika*.7(1).Hal 61
- Astuti.F dan Ningrum D.N.A.(2023). Pemetaan Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*.11.(13).413
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). Pedoman Mekanisme Operasional Penggerakan Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Lini Lapangan.Juni.BKKBN. 2022, Jakarta
- Derapjuang.id. (2022). DPC Klaten Tekankan Pentingnya Perda Untuk atasi Stunting.19 Juni2022,Klaten.<https://derapjuang.id/featured/dpc-klaten-tekankan-pentingnya-perda-untuk-atasi-stunting/>
- Dwiyanto Indiahono., “Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Analysis”. Gava Media 2017
- Efendi A.S. (2022). Bonus Demografi : Sebab, Peluang dan Tantangan. [pusdeka@unu-jogja.ac.id.29Juni20237;43](https://pusdeka@unu-jogja.ac.id/29Juni20237;43)<https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/bonus-demografi-sebab-peluang-dan-tantangan/>
- Herlina. F dan Astuti J.W.A.(2023). Efektivitas Program Pemerintah Desa Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*.3.(3).40
- Kompas.com. (2023). Bonus Demografi Jadi Sia-sia Jika Stunting Tak Tertangani Maksimal.5September2023.<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/17080331/percepat-penurunan-stunting-kemenkominfo-kampanyekan-4-terlalu?page=all>
- Media Indonesia. (2022). Pemerintah kabupaten Klaten Luncurkan Program Gong Ceting.30November2022.5.Jakarta. <https://mediaindonesia.com/nusantara/541275/pemkab-klaten-luncurkan-program-gong-ceting>
- Merliana.T.V, Karjoko.L dan Nugroho. A.2023. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Pencegahan Stunting. *Jurnal Dicretia*.4 (2).244
- Moleong, L. J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho.G.A.2023. Collaborative Governance Dalam pencegahan dan Penurunan Angka Stunting di Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Skripsi. Universitas Tidar. Magelang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021. Percepatan Penurunan Stunting. 5 agustus 2021. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 172. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pecegahan dan Penanggulangan Stunting.21 September 2020. Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 2020 Nomor 6. Klaten
- Sehat Negeriku.2023. Pravalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%.25 Januari2023.Jakarta.<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Shauma. N.U & Purbaningrum. D.G (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*.13(2).200-207
- Suara Merdeka. (2022). Gong Ceting Diharapkan Bantu Tangani Stunting di Klaten Hal

1.1Desember2022.<https://solo.suara-merdeka.com/solo-raja/pr-055885836/gong-ceting-diharapkan-bantu-tangani-stunting-di-klaten>

Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Susanti.D.F. (2022). Mengenal Apa itu Stunting.

humas.yankes@kemenkes.go.id.29 Juni2024(7:45)https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting

Tampubolon.D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi.*Jurnal Kebijakan Publik*.11(1).25-32

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan . (2017). 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting).Agustus TNP2K.Jakarta. 5